



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Rencana Kerja (Renja) Induk

DUKCAPIL Tahun 2022



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadrat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan berkat dan rahmatnya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat dapat diselesaikan. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 ini merupakan dasar atau acuan memasukan program dan kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Tahun 2022. Rencana Kerja ini juga menjelaskan tentang realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dijabarkan dalam program dan kegiatan.

Mengingat arti strategis dokumen Renja perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah Daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja perangkat Daerah mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 08 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan renja tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat.

Kepala Dinas  
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Manggarai Barat



**VALENTINUS ANDI, S.Pd**

Pembina

NIP.19740324200604101

## **DAFTAR ISI**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Sistematika penulisan
- D. Maksud dan Tujuan

### **BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA D INAS KEPENDUDUKAN DANN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021**

### **BAB III : TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2022**

### **BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2022**

### **BAB V : PENUTUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

RENJA merupakan dokumen perencanaan OPD untuk program dan kegiatan periode 1 (satu) tahun, Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN ) dan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan setiap Satuan kerja perangkat Daerah Wajib menyusun Rencana Kerja (RENJA) OPD sebagai pedoman kerja dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam RENSTRA OPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja disusun untuk satu tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan

Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil strategi, program, kegiatan pencapaian Renstra, dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA PPAS) Rencana Strategis (Renstra) secara khusus harus dijadikan acuan sepenuhnya untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), dalam hal ini Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Manggarai Barat. Berdasarkan kerangka pikir di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat sebagai Perangkat Daerah menyusun Dokumen Rancangan awal Rencana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022. Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada RPJMD dan RKPD Kabupaten Manggarai Barat serta Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026. Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan awal Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022. Oleh karena itu penyusunan rancangan awal Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan RKPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022, dengan melihat kondisi terkini dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat 2021-20

## B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009-2013;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mabar Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RJP, RPJMD dan RKPD

26. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 219);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 221 ;
28. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/ 2020/ SJ Tahun 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.
29. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;

### C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 adalah memberikan arah sekaligus pedoman bagi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra secara berkesinambungan. Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat adalah:

1. Menjadi dasar penyusunan anggaran belanja melalui APBD Kabupaten. Dan menjadi pedoman dan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan tugas.
2. Memberikan gambaran dalam melaksanakan misi untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan akan dijadikan sebagai alat observasi untuk melakukan introspeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pejabat/pimpinan instansi.
3. Memberikan arah kebijakan tentang gambaran pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi serta indikator atau ukuran keberhasilan/ kegagalan pada tahun 2022.

### D. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 disusun berdasarkan :

Bab I : Pendahuluan

#### A. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.



B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Tahun 2021.

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), serta pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Bab III : Tujuan, Sasaran Dan Program Kegiatan

Uraian garis besar tujuan, sasaran, serta program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Tahun 2022

Bab IV : Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022.

Berisikan jumlah program dan kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan serta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Bab V : Penutup

## BAB II

### Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Tahun 2021

Pencapaian pelaksanaan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021 menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran untuk tahun 2022.

*Tabel II.1: Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021*

NO	PROGRAM /SUB KEGIATAN/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021 (N)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2				4
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	LBJ		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LBJ	100 Persen	9,398,53
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersediannya Dokumen Renstra, RPJMD, PPAS, Renja dan RKA dan DPA Perangkat Daerah	LBJ	6 Dok	9,093,610
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LBJ	6 Dok	304,920
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan	LBJ	100 Persen	2,747,806,110
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji Dan Tunjangan PNS	LBJ	12 Bulan	2.074.538.110
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pengguna Anggaran, PPK, PPTK, Bendahara Keuangan, Pembantu, Bendahara, umlah Tenaga Honoror Daerah	LBJ	12 Bulan	664.440.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semestera n SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	LBJ	12 Laporan	3,914,000

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah orang yang honorinya terbayar (Bendahara Penyimpan dan Pengurus Barang)	LBJ	100 persen	9,405,160
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terbayarnya Honor Penyimpan dan Pengurus Barang	LBJ	12 Laporan	9,405,160
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	LBJ	100 Persen	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terbeli	LBJ	42 Jenis	44,191,640
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		-Jumlah makanan dan minuman rapat biasa . -Jumlah makanan dan minuman tamu	LBJ	12 Laporan	10,050,000
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	LBJ	24600 Lemabr	7,672,000
10	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Laporan	LBJ	12 Laporan	4,903,860
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LBJ	100 persen	131,065,000
12	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD	LBJ	12 Laporan	5.416.190
13	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	LBJ	12 Laporan	13,089,350
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			LBJ	100 persen	243.500.000
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-Jumlah Belanja Alat Studio/Ranning tex -Jumlah Printer KIA Jumlah Belanja ma Anak -Jumlah belanja Komputer PC -Jumlah belanja Lapt -Jumlah belanja Lapt core i7 -Jumlah Belanja Pral personal -Komputer/Motherb Jumlah Belanja Printer	LBJ	1 unit 1 Jenis 1 Unit 4 Unit 2 Unit 4 Unit	243.500.000

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	LBJ	100 Persen	73.522.856
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-Jumlahmeterai300 -JumlahMeterai600	LBJ	500 Lembar	4.030.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan listrik yang terbayar	LBJ	3 Rekening	43.444.656
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga kebersihan kantor dan peralatan kebersihan kantor yang terbayar	LBJ	1 Orang	13.048.200
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	LBJ	100 Persen	95.272.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan operasional terawat	LBJ	14 unit	53.600.000
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja Kantor yang terawat	LBJ		41.672.000
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE PENDAFTARAN PENDUDUK	LBJ	100 Persen	850.619.930
	Pelayanan Pendaftaran penduduk	Perasentase Pelayanan Pendaftaran penduduk	LBJ	100 Persen	850.619.930
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Penduduk non Permanen dan rentan Administrasi	LBJ	100 Orang	73.768.030
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kartu Keluarga Jumlah KTP-el Jumlah KTP WNA Jumlah Penduduk Non Permanen Jumlah SKTT	LBJ	-25000 kk -15000 Jiwa -10 Jiwa -100 Jiwa -100 Jiwa	404.077.400
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Tersedianya Ribbon , film dan cleaning Kit untuk pencetakan KTP-el dan Kartu Identitas Ana	LBJ	153 Buah Bahan Cetak	300,177,000
	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait	Tergambarnya Perkembangan	LBJ	12 Laporan	72.597.500

	Pendaftaran dan Perkembangan Pendudu	Penduduk setiap tahun			
	PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	PERSENTASE PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	LBJ		690,636,130
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	LBJ		579.107.500
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Tersedianya Dokumen	LBJ		146.083.600
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Tersedianya Formulir PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil dan Kerta A4 80 gr untuk Pecetakan Akta Akta Pencatatan Sipil	LBJ	2 Jenis Formulir	150.042.120
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan Sipil	LBJ	50 Akta perceraian 300 Akta Kematia 4000 AKTA NIKAH	223.356.410
	Penyelenggara Pencatatan Sipil				171.154.000
	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor urusan Agama Kab dan Pengadilan Agama	LBJ	100 Persen	171.154.000
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PERSENTASEPENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	LBJ		790.705.690
	Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan dan penyajian Database Kependudukan	Persentase Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan dan penyajian Database Kependudukan	LBJ	100 Persen	579.107.500
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Tersajinya Data Penduduk secara akurat	LBJ	100 Persen	95.155.740
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependuduka	Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan antar lembaga	LBJ	3 Lembaga	70.244.240

	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Pemutakhiran Data Penduduk pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	LBJ	169 desa /Kelurahan	413.707.520
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka	LBJ		211.598.190
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Kerja sama antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah dalam Pelayanan Kependudukan			43.713.190
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Tersedianya Dokumen Inovasi	LBJ	3 Dokume Inovasi	70.821.130
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Tersedianya Aplikasi Website untuk menyampaikan Informasi dan edukasi kepada Masyarakat	LBJ	12 Laporan	97.063.870
	PROFRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PERSENTASE PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	LBJ	100 Perse	76.880.770
	Penyusunan Profil		LBJ	100 Persen	76.880.770
	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Buku Profil Data Perkembnagnan dan Proyeksi LBKependudukan	LBJ	100 Buku	76.880.770

*Table II.2 : Realisasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021*

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Thn berjalan(Thn n-1) yg di evaluasi (Tahun 2021 - INDUK)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Thn berjalan(Thn n-1) yg di evaluasi (Tahun 2021 - PERUBAHAN)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota yang dievaluasi	
		I	II	III	IV)										
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%			1										
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencana dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 Dok	9.398.530		229,114,760	2	100 Persen	2	100 Perse						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dihasilkan (Renstra, Renja,RKA,DPA,PK,Perjanjian Kinerja)	6 Dok	9.093.610	6 Dok	7.295.290	2	1.800.000	2	1.800.000	1	1.895.290	1	1.800.000	6	7.295.290
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-Jumlah laporan yang dihasilkan (LPPD,LKPD,SAKIP) -lasananya Koordinasi dengan kantor Kemeterian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan	-3 Dok	304.920	-12 Lap	37.789.350	2	0	2	6.400.450	1	10.198.900	1	21.045.000	6	37.969.270





Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang tersedia / terbeli	42 Jenis	44.191.640	153 Buah Ribon	470,117,200	3	10.940.910	3	15.135.480.	3	39.689.090	3	325.255.800,	12	391.021.280,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan Minuman yang terbayar/tersedia	620 kotak	10.050.000	200 Ktk 420 kotak	3,775,000			3	2.875.000	3		6	900.000	12	3.775.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penggandaan dokumen	-13500 lbm -200 Buk	7,672,000	13500 lbr 200 Buku	3,523,090	3	1.918.000	3	1605.090					12	3.523.090
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang terbaya	13 Jenis	4,903,860	13 Jenis	2,439,990			3	1.218.40			6	1.221.590	12	2.439.990
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota	100 Persen	131,065,000	100 Persen	406,168,810	1	300.000	3	27.426.430	3	17.3899.549	5	175.256.700,00	12	376.882.679,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah tenaga pengelola arsip yang terbayar	1 Orang	5,416,190	12 Laporan	4,990,580	3	1.200.0000	3	1.390.580	3		3	2.400.000	3	4.990.580
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Aplikasi	13,089,350	12 Laporan	10,600,000	3	2.550.000	3	3.140.580			6	4.909420	12	10.600.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah	100%	243,500,00												
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan kantor yang terbeli	1unit 1 Jenis 1 Unit 4 Unit 2 Unit	243,500,00	1unit 1 Jenis 1 Unit 4 Unit 2 Unit 4 Unit	125.000.000	1	125.000.000							1	70.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksana sosialisasi peraturan perundangan undangan			1 tahun	93,846,97										
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	24.100.000												
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang dibeli	500 Lmbar 290 Lemba	4,030,000	500 Lmbr 290 Lmbr	4,030,000										
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening listrik dan air	2 Rekening	43,444,656	2 Rekening	43,444,656										
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-1 Orang	13,048,20	12 Laporan	991,490,75										
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	72.029.290												

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-Jumlah kendaraan operasional Roda 2 -Jumlah kendaraan operasional Roda 4 -Pajak Kendaraan Bermoto Roda 2 -Pajaka Kendaraan Bermoto Roda 4	8 unit Roda 2 1 unit Roda Empat 14 unit Roda Dua 1 unit Roda Empat	53,600,000	8 unit Roda 2 1 unit Roda Empat 14 unit Roda Dua 1 unit Roda Empat	53,600,000										
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	34 unit 5 Unit 1 Paket 24 unit	41,672,000	34 unit 5 Unit 1 Paket 24 unit	32,172,000										
<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>PERSENTASE PENDAFTARAN PENDUDUK</b>		<b>850.619.930</b>												
<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>		<b>850.619.930</b>												
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Penduduk non Permanen dan rentanAdministras	100 Orang	73,768,030												
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kartu Keluarga Jumlah KTP-el Jumlah KTP WNA Jumlah Penduduk Non Jumlah Permanen Jumlah SKTT	25000 kk 15000 Jiwa 10 Jiwa 100 Jiwa 100 Jiwa	404,077,400												

Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Tersedianya Ribbon, film dan cleaning Kit untuk pencetakan KTP-el dan Kartu Identitas Anak	153 Buah	300,177,000												
Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Tersedianya Dokumen	12 Laporan	72,597,500												
<b>PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>PERSENTASE PELAYANAN PENCATATAN SIPIL</b>		<b>690.636.130</b>												
Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil		519.482.130												-
Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Tersedianya Dokumen	6250 AKT	146,083,600												-
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan Sipil	50 Akta perceraian 300 Akta Kematia 4000 AKTA NIKAH	223,356,410												
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Tersedianya Formulir Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Kertas A4 80 gr untuk Pecetakan Akta Akta Pencatatan Sipil	2 Jenis Formulir dan Kertas	150,042,120												

Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 persen	171,154,000												
Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor urusan Agama Kabu dan Pengadilan Agama	100 Persen	171,154,000												
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PERSENTASE pENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		790.705.690												
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		579.107.500												
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Data Penduduk Tersaji secara akurat	100 Persen	95,155,740												
Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Pemutakhiran Data Penduduk pada tingkat Kecamatan Desa/Kelurahan	169 Desa/ Keluhan	413,707,520	169 Desa / Keluhan	207,571,110			6	53.915.000			6	31.150.000	12	85.065.000

Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan antar lembaga	3 Lembaga	70,244,240												
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		211,598,190												
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota Kependudukan	100 Persen	43,713,19												
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Tersedianya Dokumen Inovasi	3 Dokumen Inovasi	70,821,130												
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Laporan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	12 Laporan	97,063,870												

PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PERSENTASE PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	100 Persen	76,880,770												
Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100 Perasen	76,880,770												
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil Data Perkembnagnan dan Proyeksi Kependudukan	100 Buku	76,880,770												

Tabel 3 : Capaian Kinerja Program dan Kegiatan TAHUN 2021

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Capaian pada Tahun ke-(=capaian/target x 100%)					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	1	2	3	4	5	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
				-																		
1	Pesentase Penduduk yang becKTP				80,16	76,88	85,44	87,26	90,00	90	69,21	85,44	85,59	93,47	93,27	95.64	86,33	111,13	111,13	107,12	103,63	106,27
2	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga					91,85	94,57	97,28	100	100		86,71	83,09	83,1	100,17	100		94,40	87,86	84,42	100,66	100,00
3	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran				44,64	58,48	73,75	80,85	85,00	89,12	46,53	73,75	32,37	83,7	92,44	92,45	93,47	55,35	55,35	103,53	108,29	108,30
4	Persentase Kepemilikan Akte Nikah				35,08	51,54	67,54	74,49	80,00	79,725	28,05	22,57	67,54	35,2	52,03	52,44	46,01	43,99	43,9	47,25	65,032	65,032



No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Capaian pada Tahun ke-(=capaian/target x 100%)					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	1	2	3	4	5	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
5	Perseentase Kepemilikan KIA					20,00	40,00	60,00	85,00	40.00		3,71	40,00	13,42	7.0	14..57		18.55	18.55	22.37	8.25	17.14
6	Persentase Kepemilikan Akta Kematian					23,82	32,09	32,09	40.00	108.08		27.03	32,09	28,0	100		59.08	59.08	78.94	100	250.21	
7	Ketersedian Data Base Kependudukan				ada	ada	ada	ada	ada	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada

### **BAB III**

#### **TUJUAN,SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN RENJA TAHUN 2022**

Berdasarkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dirumuskan tujuan yaitu:

- a. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- c. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama kurun waktu 1 Tahun.
- d. Untuk menjabarkan visi, misi, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 - 2026 serta merealisasikannya dalam perencanaan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Selain tujuan diatas sasaran dari renja Tahun 2022 antara lain:

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan
2. Meningkatnya pelayanan dan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk(KTP-el Kartu Keluarga, SKPWNI, Surat Keterangan SKTT, KITAS dan dokumen pendaftaran penduduk lainnya).
3. Meningkatnya pelayanan dan kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte Kelahiran, akte Perkawinan, akte Kematian dan Akte Pengakuan Anak dan dokumen pencatatan sipil lainnya)
4. Meningkatnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan (database kependudukan berbasis SIAK online terpusat )
5. Meningkatnya pemanfaatan data dan inovasi pelayanan (adanya MOU dan kerja sama dengan instansi lain)

Visi kepala daerah yaitu: “ MABAR BANGKIT MENUJU MABAR MANTAP “dan misinya yaitu:

1. Mengembangkan Pariwisata secara Berkelanjutan dan Inklusif sebagai Penggerak Utama Ekonomi;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
3. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal;
4. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Kelestarian Lingkungan;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Akuntabel, Kapabel dan Melayani.

Untuk memenuhi target visi dan misi kepala daerah serta untuk target tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat , maka dapat dirumuskan Rencana Kerja sebanyak 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan untuk

tahun 2022. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

❖ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

❖ PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Kegiatan :

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

❖ PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Kegiatan :

1. Pelayanan Pencatatan Sipil
2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

❖ PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Kegiatan:

1. Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Setelah merumuskan rencana program dan kegiatan berdasarkan visi dan misi kepala Daerah serta tujuan dan target sasaran Dinas Kependudukan dan pencatatn Sipil, maka rencana kerja dan pendanaan untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Kode dan Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan			Lokasi Kegiatan/Sub Kegiatan	jumlah Alokasi Anggaran
	Indikator Program dan Kegiatan	Target Program dan Kegiatan	Hasil Kegiatan		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		100%		2.317.705.556
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		6 Dokumen	Labuan Bajo	14.453.200
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen yang dihasilkan (Renstra, Renja,RKA,DPA,PK,Perjanjian Kinerja)	6 Dokumen	Labuan Bajo	11,962,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan yang dihasilkan (LPPD,LKPD,SAKIP)	3 Dokumen	Labuan Bajo	2,891,600
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan		100%	Labuan Bajo	2,742,892,110
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan administrasi keuangan	Jumlah gaji dan tunjangan ASN sebanyak 19 orang yang terbayar	14 Lap	Labuan Bajo	1,857,692,80
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan administrasi keuangan	Jumlah gaji TKD (10 org) dan Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan (7 org)	14 Lap	Labuan Bajo	320,228,800
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan administrasi keuangan	Jumlah laporan yang dihasilkan (Lap.Triwulan,Lap.Semesteran,LRA,LAK, Neraca)	5 lap	Labuan Bajo	3,919,500
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah orang yang honorinya terbayar (Bendahara Penyimpan dan Pengurus Barang)		100%		9,722,80
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah orang yang honorinya terbayar (Bendahara Penyimpan dan Pengurus Barang)	Terbayarnya Honor Penyimpan dan Pengurus Barang	1 orang	Labuan Bajo	9,722,80
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi umum		100%		279.403.400

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi	Jumlah peralatan kantor yang tersedia / terbeli	15 jenis	Labuan Bajo	30,908,600
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	Jumlah Makanan Minuman yang terbayar/tersedia	1700 OM	Labuan Bajo	10,700,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	Jumlah penggunaan dokumen	250.500 lembar	Labuan Bajo	9,638,000
Penyediaan Bahan/Material	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	Tersedianya Laporan Bahan /Material	12 bulan	Labuan Bajo	6,320,700
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	Prosentase Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota	100%	Labuan Bajo	204,555,000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	Jumlah tenaga pengelola arsiparis yang terbayar	1 org	Labuan Bajo	6,258,100
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	Tersedianya Laporan	12 Lap	Labuan Bajo	16,600,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah		100%		107,952,668
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya barang milik daerah	Terbelinya AC Terbelinya alat Perekaman KTP - el Terbelinya Kursi putar besar Terbelinya Meja Biro (Ful Biro) Terbelinya Personal Computer Core i5 Terbelinya Printer	72 Unit 12 Unit 5 Unit 20 Unit 5 Unit	Labuan Bajo	107,952,668
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100%		15.600.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	prosentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah meterai 10000 yang tersedia	790 Lemba	Labuan Bajo	6,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	prosentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya Laporan	12 bulan	Labuan Bajo	65,700,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kanto	prosentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Bulan Belanja Jasa Kebersihan Kantor	12 Lap	Labuan Bajo	14,804,400
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara		100%		79.400.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Jumlah kendaraan Roda 4 dan 2 yang dipelihara (Jasa service, perijinan, BBM, Suku cadang dan Pajak)	14 unit 1 unit 15 unti	Labuan Bajo	65,600,000 0

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	15 Unit	Labuan Bajo	45,672,00
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE PENDAFTARAN PENDUDUK			Labuan Bajo	
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk			Labuan Bajo	
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Tersedianya Laporan penduduk Non Permanen	12 Laporan	Labuan Bajo	17,000,000
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kartu Identitas Anak Jumlah Kartu Keluarga yang terekam Jumlah KTP WNA Jumlah Perekaman KTP-el Tersedianya Laporan SKTT	20000 Anak 30000 Dokum 100 keping 7000 keping 50 keping	Labuan Bajo	295,490,000
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah terbelinya ribbon	200 Buah Ribbon	Labuan Bajo	200,086,000
Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	12 Laporan	Labuan Bajo	62,685,000
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				
Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-Jumlah Buku Profil -Tersedianya Data Agregat Kependudukan	60 Buku 2 Laporan	Labuan Bajo	76,418,000
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PERSENTASE PROGRAM PENCATATAN SIPIL			Labuan Bajo	316,688,800
Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil			Labuan Bajo	235,963,000
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Prsentase kepemilikan dokumen akta Kelahiran Persentase kepemilikan dokumen akta Kematian persentase kepemilikan dokumen akta Perkawinan	Tersedianya Laporan	50 Akta perceraian 300 Kematian 4000 Akta Nikah	Labuan Bajo	183,295,000
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP- El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Prsentase kepemilikan dokumen akta Kelahiran Persentase kepemilikan dokumen akta Kematian persentase kepemilikan	Jumlah Formulir	3000 set 4000 lembar 3500 set 1650 Lembar 2100 lembe	Labuan Bajo	52,668,000

	dokumen akta Perkawinan				
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			Labuan Bajo	95,320,600
Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Persentase kepemilikan dokumen akta Kelahiran Persentase kepemilikan dokumen akta Kematian persentase kepemilikan dokumen akta Perkawinan	Tersedianya Lapoaran	96,00 Persen 80,00 Persen 72,59 Persen	Labuan Bajo	25,440,000
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen akta Kelahiran Persentase kepemilikan dokumen akta Kematian persentase kepemilikan dokumen akta Perkawinan	Tersedianya Lapoaran	96,00 Persen 80,00 Persen 72,59 Persen	Labuan Bajo	20,464,400
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen akta Kelahiran Persentase kepemilikan dokumen akta Kematian persentase kepemilikan dokumen akta Perkawinan	Tersedianya Lapoaran	96,00 Persen 80,00 Persen 72,59 Persen	Labuan Bajo	49,416,200
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>PERSENTASE PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>			Labuan Baj	194,288,800
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			Labuan Bajo	194,288,800
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase OPD/instansi pemerintah yang memanfaatkan data kependudukan sesuai ketentuan regulasi Persentase peningkatan data kependudukan yang dimutakhirkan	Tersedianya Dokumen PKS	35 Dokumen	Labuan Bajo	38,977,800
Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Persentase OPD/instansi pemerintah yang memanfaatkan data kependudukan sesuai ketentuan regulasi Persentase peningkatan data kependudukan yang dimutakhirkan	Trsedianya Laporan database Kependudukan yang dimutakhirkan	12 Laporan	Labuan Bajo	155,311,00

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2021 - 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penyusunan dokumen ini diharapkan akan menjadi acuan dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditentukan

Dalam Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) telah digunakan Pengukuran Kinerja yang merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan untuk memiliki keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan, program, sasaran dan kebijakan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat. Melalui pengukuran kinerja, maka keberhasilan suatu instansi pemerintah akan terlihat dari kemampuan sumber daya manusianya mencapai hasil yang maksimal.

Demikian Rencana Kerja ( Renja ) ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat dalam melaksanakan kegiatan tahun 2022.

Labuan Bajo, 03 Oktober 2022

Kepala Dinas  
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Manggarai Barat



**VALENTINUS ANDI, S.Pd**

Pembina

NIP.197403242006041015